













**KEMENTERIAN HUKUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANG SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

<b>Nomor SOP</b>	<b>PPE.150.OT.02.02 Tahun 2025</b>
<b>Tgl.Pembuatan</b>	
<b>Tgl.Revisi</b>	<b>14 Januari 2025</b>
<b>Tgl.Efektif</b>	
<b>Disahkan Oleh</b>	<div><b>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANG</b>  <b><u>Dr. Dhahana Putra, Bc.IP,S.H.,M.Si.</u></b> <b>NIP. 19690909 199303 1 001</b></div>
<b>Nama SOP</b>	<b>PENGAJUAN USULAN SEWA</b>
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b>
<div>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.</div>	<div>1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer. 2. Mempunyai kemampuan analisa yang baik. 3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi SIMAN. 4. Mempunyai kemampuan menganalisa kebutuhan BMN. 5. Mempunyai kemampuan merekonsiliasi data BMN. 6. Mempunyai kemampuan membuat laporan pengelolaan BMN.</div>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/perlengkapan:</b>
<div>1. SOP Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pengawasan dan Pengendalian BMN. 2. SOP Persediaan BMN.</div>	<div>1. Komputer. 2. Printer. 3. Scanner. 4. Jaringan Internet. 5. Kamera.</div>
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Sub Bagian Pengelolaan BMN.	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .

**SOP PENGAJUAN USULAN SEWA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS DITJEN PP/ KPB	KABAG PENGELOLAAN BMN DAN UMUM/ PPK	TIM PENGELOLA ASET	PENYEWA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat permohonan sewa								
2	Memerintahkan tim pengelola asset untuk mengecek kesiapan asset.					Disposisi	1 Jam	Disposisi	
3	Memberikan informasi kesiapan asset.					Disposisi	1 Jam	Disposisi	
4	Memerintahkan pengelola asset untuk membuat SPK/S					Disposisi	1 Jam	Disposisi	
5	Menyiapkan SPK/S					Draft SPK/S	2 Jam	SPK/S	
6	Penandatanganan SPK/S					SPK/S	1 Jam	SPK/S	
7	Menerima pembayaran kontrak							Bukti Pembayaran	